



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H.SUDIRMAN,S.H.,M.H
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 402766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.170.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. Tanah Seluas 1346 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 3535 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
9. Tanah Seluas 3772 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS/JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT/C100 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY/C100 Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 389.824.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.154.497

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.724.978.997

III. HUTANG Rp. 211.607.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.513.371.497

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.